

**ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI WILAYAH
ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Novita Mukti Rinusara
165020107111007**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI WILAYAH ANTAR
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yang disusun oleh :

Nama : Novita Mukti Rinusara
NIM : 165020107111007
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Mei 2020.

Malang, 28 Mei 2020

Dosen Pembimbing,



Bahtiar Fitanto, SE., MT.

NIP. 197410181999031001

Analisis Ketimpangan Ekonomi Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Novita Mukti Rinusara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Email: novitarinusara@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai negara yang masih berkembang, ketimpangan merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia, baik ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah maupun ketimpangan ekonomi antarwilayah. Tingkat ketimpangan setiap wilayah berbeda-beda, pada kasus ini Provinsi DIY merupakan wilayah dengan ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi di Indonesia berturut-turut selama tahun 2011-2018 kecuali pada tahun 2014. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif deskriptif dimana analisis kuantitatif digunakan untuk mencari ketimpangan antarwilayah menggunakan Indeks Williamson, 4 analisis kuantitatif (LQ, Shift Share Analysis, Model Rasio Pertumbuhan, Analisis Overlay) digunakan untuk mencari sektor unggulan setiap wilayah di Provinsi DIY, dan analisis tipologi klassen untuk menentukan posisi perekonomian setiap kabupaten/kota. Sedangkan analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis kondisi setiap wilayah di Provinsi DIY guna menemukan strategi yang tepat bagi setiap wilayah untuk meningkatkan perekonomiannya sehingga mampu mengurangi tingkat ketimpangan antarwilayah di Provinsi DIY.

Kata kunci: Ketimpangan, sektor unggulan, ekonomi pembangunan.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006:9). Pertumbuhan ekonomi selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dan kemudian disertai dengan perubahan baik dalam berbagai aspek penting seperti perkembangan pendidikan, peningkatan kesehatan, perkembangan teknologi, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kemakmuran masyarakat disebut sebagai pembangunan ekonomi. Dapat didefinisikan dengan mudah bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan dalam suatu negara (Sukirno, 2006:10).

Akan tetapi, tidak selamanya pembangunan ekonomi memberikan dampak positif terhadap masyarakat, menurut Todaro (2011:251) pembangunan memerlukan *Gross National Income* (GNI) atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Namun, masalah utamanya bukan hanya bagaimana menumbuhkan PDB, tapi juga siapa yang menumbuhkan PDB tersebut, apakah sejumlah besar masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut atau hanya segelintir masyarakat saja. Jika pertumbuhan PDB dikarenakan sebagian kecil masyarakat, maka manfaat pertumbuhan PDB juga hanya akan dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat tersebut, sehingga akan muncul masalah kemiskinan dan ketimpangan dalam perekonomian. Dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi akan terjadi bila terdapat pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB dan distribusi kegiatan ekonomi dilihat dari penyumbang dan penikmat PDB.

Kondisi perekonomian pada masyarakat tiap daerah cenderung berbeda, semakin tinggi ketidaksetaraan kondisi ekonomi dalam masyarakat menandakan bahwa ketimpangan pada wilayah tersebut semakin tinggi. Menurut Adisasmita (2013:112) terdapat perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah. Perbedaan dalam laju pertumbuhan ekonomi antar daerah tersebut mencerminkan perbedaan dalam tingkat kemajuan dari berbagai daerah, dengan kata lain hal tersebut merupakan ketimpangan atau disparitas antar daerah. Kesenjangan antar daerah terjadi dimana-mana dan sudah menjadi fenomena umum, yang cenderung di banyak negara menunjukkan kondisi yang masih memprihatinkan (Adisasmita, 2013:112).

Indonesia sebagai negara yang masih berkembang, ketimpangan menjadi fenomena yang umum terjadi. Salah satu contoh di Indonesia yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi pada tahun 2011-2013 dan 2015-2018. Pada tahun 2014, Provinsi DKI Jakarta mengambil tempat pertama dengan perbedaan gini *ratio* sebesar 0,001.

Tabel 1: Perbandingan *Gini Ratio* Antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dengan *Gini Ratio* Provinsi DIY dan Nasional (Tahun 2013-2017)

Wilayah	Tahun					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Kota Yogyakarta	0,44	0,40	0,45	0,43	0,45	0,434
Kabupaten Sleman	0,39	0,41	0,45	0,39	0,41	0,410
Kabupaten Bantul	0,33	0,32*	0,37	0,40	0,41*	0,366
Kabupaten Kulon Progo	0,33	0,36	0,37	0,37	0,39	0,364
Kabupaten Gunungkidul	0,32	0,28	0,31	0,33	0,34	0,316
Provinsi DIY	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,422
Indonesia	0,40	0,41	0,40	0,39	0,39	0,398

* = angka sementara

Sumber: BPS; BPS Provinsi DIY; RPJMD Kota Yogyakarta; RPJMD Kab. Sleman; RPJMD Kab. Bantul; RPJMD; Kab. Kulon Progo; RPJMD Kab. Gunung Kidul; dan BAPPEDA DIY

Untuk mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu daerah, perlu dilakukan pemerataan pendapatan masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan lain sebagainya. Untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan perlu program yang mampu meningkatkan aktivitas perekonomian daerah dikarenakan dengan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Terbukanya lapangan pekerjaan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga pemerataan pendapatan di masyarakat akan terjadi. Sedangkan dengan meningkatnya penerimaan daerah, pemerintah daerah mampu membiayai program-program yang akan memberikan manfaat baik secara sosial maupun ekonomi terhadap masyarakat yang nantinya diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dalam wilayah tersebut.

Akan tetapi untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah dinilai memiliki permasalahan yang lebih kompleks jika dibandingkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ini karena wilayah yang satu dengan lainnya memiliki kondisi yang berbeda dan cenderung timpang dari berbagai sisi baik dari segi pendapatan, jumlah penduduk, potensi wilayah, IPM, infrastuktur dan lain sebagainya. Contoh pertama, Kabupaten Gunungkidul sebagai wilayah terluas di Provinsi DIY memiliki jaringan jalan paling sedikit, sementara Kota Yogyakarta sebagai wilayah paling sempit di Provinsi DIY justru memiliki jaringan jalan paling banyak. Contoh lainnya yakni rata-rata lama sekolah, pada tahun 2018 Kota Yogyakarta memiliki rata-rata lama sekolah 11,44 tahun sementara itu Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata lama sekolah 8,65 tahun dan 7 tahun. Kesenjangan-kesenjangan seperti itu yang kemudian akan menyumbang peran terhadap kesenjangan ekonomi antarwilayah di Provinsi DIY.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Kebanyakan literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangannya selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006:9). Perkembangan inilah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan riil nasional juga untuk meningkatkan produktivitas (Irawan dan Suparmoko, 2012:4).

Pembangunan ekonomi berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, perbedaannya adalah pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa, tetapi diukur perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek seperti: perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia, dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2006:10).

Ketimpangan

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah belakang (*underdeveloped region*). Terjadinya ketimpangan antarwilayah ini membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat antarwilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antarwilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Sjafrizal, 2008:104).

Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2014:28). Sedangkan menurut Tarigan (dalam Rachmadi *et.al*, 2017:6) sektor basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang dan jasa ke tempat di luar perbatasan perekonomian masyarakat atau memasarkan barang dan jasa kepada orang yang datang dari luar batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sedangkan sektor non-basis adalah sektor-sektor yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang-orang dalam batas wilayah perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian kegiatan basis mempunyai peran penting sebagai penggerak utama perekonomian dalam suatu daerah.

Penanaman Modal

Menurut Angraini (2018:21-22) peningkatan investasi diyakini memiliki kontribusi sebagai pengungkit terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi suatu bangsa. Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Suatu negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang dikeluarkan jauh lebih besar dari nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. Negara yang memiliki investasi yang lebih kecil daripada penyusutan faktor produksinya akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi yang tergambar dari kondisi perekonomian dengan laju pertumbuhan yang lambat yang tentunya berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari suatu perusahaan. Ketenagakerjaan menyangkut kelangsungan proses produksi perusahaan dalam dunia industri. Dari sudut pandang lain, ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari suatu negara dalam hal pelaksanaan pembangunan ekonomi (Hastyorini, 2019:2). Menurut BPS tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang berumur 15-64

tahun. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan uang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari BPS Provinsi DIY, BPS Kota Yogyakarta, BPS Kabupaten Sleman, BPS Kabupaten Bantul, BPS Kabupaten Kulon Progo, dan BPS Kabupaten Gunungkidul serta data yang berpedoman pada informasi seperti publikasi tahunan dan dokumen yang diterbitkan oleh BAPPEDA setiap wilayah di Provinsi DIY. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data panel, yaitu data yang menggabungkan data *cross section* dan *time series*. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan deskriptif. Dalam proses analisis deskriptif digunakan 6 alat analisis yang berbeda.

Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah

Yang pertama yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan ekonomi antarwilayah, dalam hal ini digunakan Indeks Williamson dengan rumus sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}} \quad 0 < V_w < 1$$

Keterangan:

y_i : PDRB per kapita di kabupaten/kota di Provinsi DIY

\bar{y} : PDRB per kapita rata-rata di Provinsi DIY

f_i : Jumlah penduduk di kabupaten/kota di Provinsi DIY

n : Jumlah penduduk Provinsi DIY

Analisis Sektor Unggulan

Dalam menganalisis sektor unggulan setiap wilayah di Provinsi DIY digunakan 4 alat analisis yang masing-masing diberi poin 1 atau 0. Sektor yang memiliki 4 poin akan menjadi sektor unggulan pada wilayah tersebut. 4 analisis yang digunakan yaitu *Location Quotient* (LQ), *Shift Share Analysis*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dan Analisis Overlay. Masing-masing analisis memiliki peranan yang berbeda-beda. LQ berperan untuk mengklasifikasikan sektor basis dan non-basis pada wilayah. Sektor basis merupakan sektor yang dapat mendorong perekonomian ekonomi wilayah (Tarigan, 2014:28).

$$LQ = \frac{S_i/S}{N_i/N}$$

Keterangan:

LQ = besarnya nilai LQ

S_i = nilai tambah sektor i di wilayah kabupaten/kota

S = PDRB wilayah analisis

N_i = nilai tambah sektor i di tingkat provinsi

N = PDRB di tingkat provinsi

Shift Share Analysis merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah, metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional.

$$\text{Shift Share} = R_a(Y_{ij}) + (R_i - R_a)Y_{ij} + (r_i - R_i)Y_{ij}$$

Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan alat analisis alternatif yang dapat digunakan dalam perencanaan wilayah dan kota yang diperoleh dengan memodifikasi model *shift share analysis* (yusuf, 1999:220). Analisis MRP digunakan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi terutama struktur ekonomi wilayah yang menekankan pada kriteria pertumbuhan baik secara eksternal (wilayah referensi)

dan internal (wilayah studi). Terdapat 2 komponen dalam analisis MRP yaitu RPr (rasio pertumbuhan wilayah referensi) dan RPs (rasio pertumbuhan wilayah studi).

$$RPr = \frac{Yin/Yin(t)}{Yn/Yn(t)}$$

Keterangan:

Yin = perubahan PDRB sektor i pada Provinsi DIY

Yin(t) = PDRB Provinsi DIY sektor i pada awal tahun penelitian

Yn = Perubahan PDRB Provinsi DIY

Yn(t) = PDRB Provinsi DIY pada tahun awal metode penelitian

$$RPs = \frac{Yij/Yij(t)}{Yj/Yj(t)}$$

Keterangan:

Yij = Perubahan sektor i Kabupaten/Kota di DIY

Yij(t) = PDRB sektor i Kabupaten/Kota di DIY pada awal tahun periode penelitian

Yj = Perubahan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

Yj(t) = PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi DIY pada awal tahun periode penelitian

Analisis overlay digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan menggabungkan alat analisis dengan tujuan untuk menyaring hasil analisis yang paling baik (Sabar dalam Dede *et.al*, 2016:103). Analisis overlay menggabungkan hasil analisis LQ dan hasil analisis MRP yaitu RPs sehingga terdapat dua komponen dalam analisis yakni pertumbuhan (RPs) dan kontribusi (LQ).

Analisis Posisi Perekonomian Wilayah

Analisis ini digunakan untuk mengetahui posisi perekonomian setiap wilayah di Provinsi DIY. Menurut Kuncoro (dalam Nurhasanah *et.al*, 2018:26), alat analisis tipologi wilayah (tipologi klasen dengan pendekatan regional) digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Dalam analisis ini, tipologi klasen membagi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pendapatan per kapita daerah (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan dua indikator tersebut, tipologi klasen membagi daerah menjadi empat bagian sebagai berikut

Tabel 2: Klasifikasi Tipologi Klasen Pendekatan Regional

Laju Pertumbuhan	PDRB per Kapita	$y_i > y$	$y_i < y$
		$r_i > r$	Kuadran I Daerah maju dan tumbuh dengan pesat
$r_i < r$		Kuadran III Daerah yang masih dapat berkembang cepat	Kuadran IV Daerah relatif tertinggal

Sumber: Nurhasanah *et.al* (2018:26)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Provinsi DIY

Tabel 3: Indeks Williamson Provinsi DIY tahun 2011-2018

Wilayah	Tahun							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DIY	0.478	0.479	0.476	0.481	0.482	0.482	0.480	0.476

Sumber: Penulis, 2020

Ketimpangan antarwilayah di Provinsi DIY pada tahun 2011-2018 termasuk dalam kategori sedang karena berada pada $0.3 < IW < 0.5$, meskipun termasuk kategori ketimpangan antarwilayah sedang, angka Indeks Williamson Provinsi DIY berada di batas atas kategori ketimpangan sedang..

Analisis Sektor Unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

- a. Kota Yogyakarta

Hasil analisis LQ, *Shift Share*, Model Rasio Pertumbuhan, dan Overlay Kota Yogyakarta dapat diringkas menjadi seperti berikut:

Tabel 4: **Sektor Unggulan Kota Yogyakarta**

Sektor	Hasil Analisis			
	LQ	SS	MRP	Overlay
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
Industri Pengolahan	•	-	-	-
Pengadaan Listrik dan Gas	•	•	•	•
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	•	-	-	-
Konstruksi	-	-	-	-
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	•	•	-
Transportasi dan Pergudangan	-	-	-	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	•	•	•	•
Informasi dan Komunikasi	•	•	•	•
Jasa Keuangan dan Asuransi	•	•	•	•
Real Estat	•	-	•	•
Jasa Perusahaan	•	•	•	•
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	•	•	•	•
Jasa Pendidikan	•	•	•	•
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	•	•	•	•
Jasa Lainnya	•	•	•	•

Sumber: data diolah penulis, 2020

Dari tabel 4 terdapat 9 sektor yang mendapat 4 poin yaitu pada kategori sektor basis, sektor dengan pertumbuhan cepat, sektor dengan pertumbuhan menonjol, dan sektor potensial di Kota Yogyakarta. Sehingga Kota Yogyakarta memiliki 9 sektor unggulan yaitu:

1. Pengadaan Listrik dan Gas
 2. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
 3. Informasi dan Komunikasi
 4. Jasa Keuangan dan Asuransi
 5. Jasa Perusahaan
 6. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
 7. Jasa Pendidikan
 8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
 9. Jasa Lainnya
- b. Kabupaten Sleman

Hasil analisis LQ, *Shift Share*, Model Rasio Pertumbuhan, dan Overlay Kabupaten Sleman dapat diringkas menjadi seperti berikut:

Tabel 5: **Sektor Unggulan Kabupaten Sleman**

Sektor	Hasil Analisis			
	LQ	SS	MRP	Overlay
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
Industri Pengolahan	-	-	-	-
Pengadaan Listrik dan Gas	-	•	•	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-
Konstruksi	•	•	•	•

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	•	•	-
Transportasi dan Pergudangan	•	•	-	•
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	•	•	•	•
Informasi dan Komunikasi	-	•	•	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	-	•	•	-
Real Estat	•	•	•	•
Jasa Perusahaan	•	•	•	•
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	-	•	-	-
Jasa Pendidikan	•	•	•	•
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	•	•	-
Jasa Lainnya	-	•	•	-

Sumber: data diolah penulis, 2020

Dari tabel 5 terdapat 5 sektor yang mendapat 4 poin yaitu pada kategori sektor basis, sektor dengan pertumbuhan cepat, sektor dengan pertumbuhan menonjol, dan sektor potensial di Kabupaten Sleman. Sehingga Kabupaten Sleman memiliki 5 sektor unggulan yaitu:

1. Konstruksi
2. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
3. Real Estat
4. Jasa Perusahaan
5. Jasa Pendidikan

c. Kabupaten Bantul

Hasil analisis LQ, *Shift Share*, Model Rasio Pertumbuhan, dan Overlay Kabupaten Bantul dapat diringkas menjadi seperti berikut:

Tabel 6: Sektor Unggulan Kabupaten Bantul

Sektor	Hasil Analisis			
	LQ	SS	MRP	Overlay
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	•	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian	•	-	-	-
Industri Pengolahan	•	-	-	-
Pengadaan Listrik dan Gas	•	•	•	•
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-
Konstruksi	•	-	•	•
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	•	•	•
Transportasi dan Pergudangan	-	-	-	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	•	•	•	•
Informasi dan Komunikasi	-	•	•	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	-	•	•	-
Real Estat	-	•	•	-
Jasa Perusahaan	-	•	•	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	-	•	•	-
Jasa Pendidikan	-	•	•	-
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	•	•	-
Jasa Lainnya	-	•	•	-

Sumber: data diolah penulis, 2020

Dari tabel 6 terdapat 2 sektor mendapat 4 poin yaitu pada kategori sektor basis, sektor dengan pertumbuhan cepat, sektor dengan pertumbuhan menonjol, dan sektor potensial di Kabupaten Bantul. Sehingga Kabupaten Bantul memiliki 2 sektor unggulan yaitu:

1. Pengadaan Listrik dan Gas
2. Penyediaan Akomodasi Jasa Makan dan Minum

d. Kabupaten Kulon Progo

Hasil analisis LQ, *Shift Share*, Model Rasio Pertumbuhan, dan Overlay Kabupaten Bantul dapat diringkas menjadi seperti berikut:

Tabel 7: **Sektor Unggulan Kabupaten Kulon Progo**

Sektor	Hasil Analisis			
	LQ	SS	MRP	Overlay
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	•	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian	•	•	-	•
Industri Pengolahan	-	-	-	-
Pengadaan Listrik dan Gas	-	•	•	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	•	-	-	-
Konstruksi	-	•	•	-
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	•	-	-	•
Transportasi dan Pergudangan	•	-	-	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	•	•	-
Informasi dan Komunikasi	-	•	•	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	-	•	•	-
Real Estat	-	•	-	-
Jasa Perusahaan	-	-	-	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	•	•	-	-
Jasa Pendidikan	-	•	•	-
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	•	•	-
Jasa Lainnya	•	-	-	-

Sumber: data diolah penulis, 2020

Dari tabel 7 tidak terdapat sektor yang mendapat 4 poin pada seluruh kategori sektor basis, sektor dengan pertumbuhan cepat, sektor dengan pertumbuhan menonjol, dan sektor potensial di Kabupaten Kulon Progo. Hanya 1 sektor dengan 3 poin yaitu kategori sektor basis, sektor dengan pertumbuhan cepat, dan sektor potensial yakni Sektor Pertambangan dan Penggalian. Selain sektor tersebut, sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Kulon Progo hanya mendapat 2 poin saja.

e. Kabupaten Gunungkidul

Hasil analisis LQ, *Shift Share*, Model Rasio Pertumbuhan, dan Overlay Kabupaten Gunungkidul dapat diringkas menjadi seperti berikut:

Tabel 8: **Sektor Unggulan Kabupaten Gunungkidul**

Sektor	Hasil Analisis			
	LQ	SS	MRP	Overlay
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	•	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian	•	-	-	-
Industri Pengolahan	-	-	-	-
Pengadaan Listrik dan Gas	-	•	•	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	•	-	-	-
Konstruksi	-	•	•	-

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	•	•	•	•
Transportasi dan Pergudangan	-	-	-	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	•	•	-
Informasi dan Komunikasi	-	•	•	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	-	•	•	-
Real Estat	-	•	•	-
Jasa Perusahaan	-	•	•	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	•	-	•	•
Jasa Pendidikan	-	-	-	-
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	•	•	-
Jasa Lainnya	•	•	•	•

Sumber: data diolah penulis, 2020

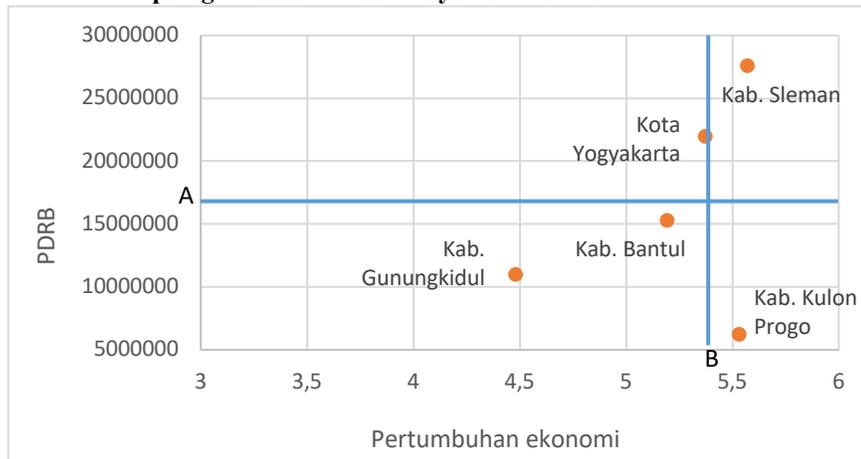
Dari tabel 8 terdapat 2 sektor mendapat 4 poin yaitu pada kategori sektor basis, sektor dengan pertumbuhan cepat, sektor dengan pertumbuhan menonjol, dan sektor potensial di Kabupaten Gunungkidul. Sehingga Kabupaten Gunungkidul memiliki 2 sektor unggulan yaitu:

1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
2. Jasa Lainnya

Analisis Posisi Perekonomian Wilayah

Untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah digunakan analisis tipologi klasen dengan pendekatan regional. Tipologi klasen memiliki dua indikator yaitu pertumbuhan ekonomi daerah (r) dan pendapatan perkapita daerah (PDRB) (y). Dua indikator tersebut membagi daerah menjadi empat bagian: Kuadran I (daerah maju dan tumbuh dengan pesat); Kuadran II (daerah maju tapi tertekan); Kuadran III (daerah yang masih dapat berkembang cepat); Kuadran IV (daerah relatif tertinggal).

Gambar 1: **Tipologi Klasen Antarwilayah di Provinsi DIY**



Sumber: BPS diolah penulis, 2020

Keterangan:

A: rata-rata PDRB Provinsi DIY

B: rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY

Berdasarkan gambar 1 diatas, berikut klasifikasi masing-masing wilayah di Provinsi DIY: Kuadran I hanya diduduki oleh Kabupaten Sleman; Kuadran II hanya diduduki oleh Kabupaten Kulon Progo; Kuadran III hanya diduduki oleh Kota Yogyakarta; Kuadran IV diduduki oleh Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan guna mengetahui kondisi setiap wilayah di Provinsi DIY dari berbagai aspek, dalam analisis ini digunakan data masing-masing wilayah sebagai berikut: PDRB, Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, RPJMD.

a. Provinsi DIY

Dapat disimpulkan terdapat beberapa masalah dalam pembangunan di Provinsi DIY, berikut beberapa masalah penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi DIY:

- a. Kegiatan ekonomi terpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
- b. Kemiskinan diatas rata-rata nasional.
- c. Investasi terpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.
- d. Ketimpangan IPM antarwilayah

Berikut beberapa strategi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi DIY

1. Tidak memusatkan kegiatan ekonomi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Strategi ini akan sulit dilakukan dikarenakan kondisi dua wilayah tersebut sangat strategis dan tidak mungkin kegiatan ekonomi dipindahkan ke wilayah lain yang memiliki aksesibilitas kurang dari dua wilayah tersebut. Jika dilakukan pemindahan aktivitas ekonomi ke wilayah lainnya akan membutuhkan banyak biaya dan tenaga. Akan tetapi jika bisa dilaksanakan, akan memberikan dampak positif dapat menumbuhkan perekonomian wilayah lainnya dengan signifikan.

2. Mempermudah mobilitas penduduk ke pusat kegiatan ekonomi.

Selama ini akses kendaraan umum di Provinsi DIY yaitu Trans Jogja hanya beroperasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman saja sehingga wilayah lainnya tidak dapat mengakses kendaraan umum ini dan mengharuskan memiliki kendaraan pribadi atau menggunakan ojek online jika ke Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dengan biaya Trans Jogja yang murah ditambah jangkauan yang luas, dan armada yang lebih banyak, masyarakat pada wilayah lainnya dapat menggunakannya dan menjangkau pusat kegiatan ekonomi dengan mudah dan cepat tanpa kesulitan.

3. Memeratakan IPM

IPM di Provinsi DIY memiliki ketimpangan yang sangat parah, pada tahun 2018 Kota Yogyakarta memiliki IPM 86,11 dan Kabupaten Gunungkidul memiliki IPM 69,24. Adanya ketimpangan pada IPM ini akan memengaruhi kualitas tenaga kerja yang dimiliki setiap wilayah, untuk itu berikut beberapa strategi untuk mengatasinya:

- a. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar SD-SMP-SMA
 - i. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
 - ii. Memenuhi fasilitas dan sarana prasarana dasar sekolah.
 - iii. Meningkatkan standar kualitas setiap sekolah.
- b. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan

Layanan kesehatan berkualitas di Provinsi DIY masih berpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Karena itu, untuk meningkatkan IPM dimana kesehatan menjadi salah satu indeksnya, perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo.

4. Memeratakan investasi masuk

Permasalahan dalam investasi juga masih terpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sehingga pertumbuhan ekonomi dan PDRB dua wilayah tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Dengan menarik dan pemeratakan investasi di Provinsi DIY maka kemudian dapat meningkatkan aktivitas ekonomi wilayah lainnya, ini dapat dilakukan dengan:

- a. Mengoptimalkan potensi wilayah
- b. Pemerataan infrastruktur
 - i. Meningkatkan kondisi jalan pada wilayah pinggiran yang memiliki jaringan jalan sempit dan rusak.
 - ii. Meningkatkan akses kendaraan umum bagi masyarakat.
- c. Mempermudah prosedur perizinan dan pelayanan penanaman modal.

- i. Menyederhanakan prosedur perizinan penanaman modal.
 - ii. Mempermudah cara untuk mengakses pelayanan penanaman modal.
- 5. Mengembangkan kawasan selatan
 - a. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
 - i. Meningkatkan *skill* masyarakat dengan pelatihan tenaga kerja dan penyuluhan.
 - ii. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
 - iii. Mempermudah akses layanan kesehatan dan pendidikan untuk seluruh masyarakat.
 - b. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat
 - i. Mempermudah kredit usaha rakyat.
 - ii. Memberi pelatihan dan penyuluhan tentang berwirausaha.
 - iii. Mempermudah perizinan berwirausaha bagi masyarakat.
 - iv. Mempermudah distribusi hasil produksi.

b. Kota Yogyakarta

Dapat disimpulkan permasalahan yang dimiliki Kota Yogyakarta yaitu:

- a. Ketimpangan distribusi pendapatan tinggi.
- b. Luas wilayah sempit.

Berikut beberapa strategi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta sehingga dapat berkontribusi mengurangi ketimpangan antarwilayah di Provinsi DIY:

- 1. Meningkatkan dan pemeratakan kualitas pendidikan dasar (SD, SMP, dan SMA)
 - a. Meningkatkan dan pemeratakan kualitas guru.
 - b. Meningkatkan dan pemeratakan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan sekolah.
 - c. Meningkatkan dan pemeratakan standar dan keketatan peraturan setiap sekolah.
- 2. Mengembangkan sektor jasa secara optimal
 - a. Mempermudah perizinan sektor jasa.
 - b. Meningkatkan pengawasan terhadap sektor jasa.
 - c. Memperbesar alokasi investasi pada sektor jasa.

c. Kabupaten Sleman

Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki beberapa permasalahan berikut:

- a. Penurunan angka pengangguran sangat lambat.
- b. Ketimpangan distribusi pendapatan tinggi
- c. Akses penanaman modal sulit.

Dari beberapa permasalahan di Kabupaten Sleman itu kemudian dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
 - a. Meningkatkan *skill* masyarakat dengan pelatihan tenaga kerja dan penyuluhan.
 - b. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
 - c. Mempermudah akses layanan kesehatan dan pendidikan untuk seluruh masyarakat.
- 2. Mengembangkan industri padat karya
 - a. Memberikan bantuan baik finansial maupun sarana prasarana kepada industri padat karya
 - b. Mempermudah alur distribusi produksi.
 - c. Mempermudah kredit usaha untuk industri padat karya.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap industri padat karya.
 - e. Memberikan pelatihan bagi tenaga kerja industri padat karya agar lebih produktif.
- 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat
 - a. Mempermudah kredit usaha rakyat.
 - b. Memberi pelatihan dan penyuluhan tentang berwirausaha.
 - c. Mempermudah perizinan berwirausaha bagi masyarakat.
 - d. Mempermudah distribusi hasil produksi.
- 4. Mengoptimalkan sektor pertanian.
 - a. Memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi petani mengenai teknologi pertanian.
 - b. Mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai hasil pertanian.
 - c. Memberikan bantuan bibit ataupun fasilitas pertanian lainnya.
 - d. Mempermudah alur distribusi hasil pertanian kepada konsumen.

- e. Memperluas pangsa pasar hasil pertanian Kabupaten Sleman ke wilayah lain.
5. Mempermudah penanaman modal
 - a. Menyederhanakan prosedur perizinan penanaman modal.
 - b. Mempermudah perizinan penanaman modal.
 - c. Mempermudah cara untuk mengakses pelayanan penanaman modal.
 - d. Memantau dan mengawasi jalannya penanaman modal.
- d. Kabupaten Bantul
- Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut:
- a. Jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi DIY.
 - b. Realisasi investasi masuk rendah.
 - c. Pengangguran meningkat.
- Dari beberapa permasalahan di Kabupaten Bantul itu kemudian dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas SDM
 - a. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik formal maupun informal.
 - b. Memenuhi kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan dasar dan perguruan tinggi.
 - c. Meningkatkan standar pendidikan.
 - d. Memberikan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas dan *skill* tenaga kerja.
 - e. Meningkatkan layanan kesehatan di Kabupaten Bantul.
 2. Mengembangkan industri padat karya
 - a. Memberikan bantuan baik finansial maupun sarana prasarana kepada industri padat karya
 - b. Mempermudah kredit usaha untuk industri padat karya.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap industri padat karya.
 - d. Memberi pelatihan bagi tenaga kerja industri padat karya agar lebih produktif.
 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat
 - a. Memberi pelatihan dan penyuluhan tentang berwirausaha.
 - b. Mempermudah perizinan berwirausaha bagi masyarakat.
 - c. Mempermudah distribusi hasil produksi.
 4. Mengoptimalkan sektor pertanian.
 - a. Memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi petani mengenai teknologi pertanian.
 - b. Mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai hasil pertanian.
 - c. Memberikan bantuan bibit ataupun fasilitas pertanian lainnya.
 - d. Mempermudah alur distribusi hasil pertanian kepada konsumen.
 - e. Memperluas pangsa pasar hasil pertanian Kabupaten Bantul ke wilayah lainnya.
 5. Mempermudah penanaman modal
 - a. Mempermudah cara untuk mengakses pelayanan penanaman modal.
 - b. Memantau dan mengawasi jalannya penanaman modal.
- e. Kabupaten Kulon Progo
- Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa permasalahan berikut:
- a. Persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi DIY.
 - b. Realisasi investasi masuk rendah.
- Dari beberapa permasalahan di Kabupaten Kulon Progo itu kemudian dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas SDM
 - a. Mempermudah akses pendidikan bagi seluruh warga Kulon Progo.
 - b. Meningkatkan standar pendidikan.
 - c. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik formal maupun informal.
 - d. Memenuhi kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan dasar dan perguruan tinggi.
 - e. Memberikan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas dan *skill* tenaga kerja.

- f. Meningkatkan layanan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo
- 2. Mengoptimalkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
 - a. Memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi petani mengenai teknologi pertanian.
 - b. Memberikan pelatihan dan penyuluhan rutin bagi masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan.
 - c. Mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai hasil pertanian.
 - d. Mengembangkan pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai hasil perikanan.
 - e. Memberikan bantuan bibit ataupun fasilitas lainnya pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
 - f. Mempermudah alur distribusi hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan kepada konsumen.
 - g. Memperluas pangsa pasar distribusi hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan ke wilayah lainnya.
 - h. Memantau dan mengawasi sub-sektor kehutanan dan perikanan.
- 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat
 - a. Memberi pelatihan dan penyuluhan tentang berwirausaha.
 - b. Mempermudah perizinan berwirausaha bagi masyarakat.
 - c. Mempermudah distribusi hasil produksi.
- 4. Mempermudah penanaman modal
 - a. Menyederhanakan prosedur perizinan penanaman modal.
 - b. Mempermudah perizinan penanaman modal.
 - c. Mempermudah cara untuk mengakses pelayanan penanaman modal.
 - d. Memantau dan mengawasi jalannya penanaman modal.
- f. Kabupaten Gunungkidul

Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa permasalahan berikut:

- a. Merupakan wilayah tertinggal dalam klasifikasi tipologi klassen.
- b. Jumlah penduduk miskin tinggi.
- c. Pengangguran cenderung meningkat.
- d. Realisasi investasi masuk rendah.

Dari beberapa permasalahan di Kabupaten Gunungkidul itu kemudian dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas SDM
 - a. Mempermudah akses pendidikan bagi seluruh warga Kabupaten Gunungkidul.
 - b. Meningkatkan standar pendidikan.
 - c. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik formal maupun informal.
 - d. Memenuhi kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan dasar dan perguruan tinggi.
 - e. Memberikan pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas dan *skill* tenaga kerja.
 - f. Meningkatkan layanan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul.
- 2. Mengoptimalkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
 - a. Memberikan pelatihan dan penyuluhan rutin bagi masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan dan perikanan.
 - b. Mengembangkan pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai hasil perikanan.
 - c. Memberikan bantuan bibit ataupun fasilitas lainnya bagi sub-sektor kehutanan, dan perikanan.
 - d. Mempermudah alur distribusi hasil kehutanan dan perikanan kepada konsumen.
 - e. Memperluas pangsa pasar distribusi hasil kehutanan dan perikanan ke wilayah lainnya.
 - f. Memantau dan mengawasi berjalannya sub-sektor kehutanan dan perikanan.
- 3. Mengoptimalkan sektor pariwisata.
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata
 - b. Meningkatkan sarana prasarana dan infrastruktur untuk menunjang sektor pariwisata.
 - c. Mengoptimalkan daya tarik setiap tempat wisata

- d. Melakukan pemasaran besar-besaran sektor pariwisata guna menarik wisatawan.
 - e. Meningkatkan kebersihan tempat wisata.
 - f. Memantau dan mengawasi jalannya sektor pariwisata.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat
 - a. Mempermudah kredit usaha rakyat.
 - b. Memberi pelatihan dan penyuluhan tentang berwirausaha.
 - c. Mempermudah perizinan berwirausaha bagi masyarakat.
 - d. Mempermudah distribusi hasil produksi.
 5. Mempermudah penanaman modal
 - a. Menyederhanakan prosedur perizinan penanaman modal.
 - b. Mempermudah perizinan penanaman modal.
 - c. Mempermudah cara untuk mengakses pelayanan penanaman modal.
 - d. Memantau dan mengawasi jalannya penanaman modal.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

1. Meskipun tingkat ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi DIY merupakan yang tertinggi di Indonesia, tingkat ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi DIY termasuk dalam kategori ketimpangan sedang $0,3 < IW < 0,5$. Akan tetapi ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi DIY berada di batas atas kategori sedang.
2. Berdasarkan analisis sektor unggulan, seluruh wilayah di Provinsi DIY memiliki sektor unggulan kecuali Kabupaten Kulon Progo yang hanya memiliki 1 sektor dengan 3 poin yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian.
3. Posisi perekonomian setiap wilayah di Provinsi DIY yang dianalisis menggunakan tipologi klassen menunjukkan hasil sebagai berikut: Kuadran I (daerah maju dan tumbuh dengan pesat) yaitu Kabupaten Sleman; Kuadran II (daerah maju tapi tertekan) yaitu Kabupaten Kulon Progo; Kuadran III (daerah yang masih dapat berkembang cepat) yaitu Kota Yogyakarta; Kuadran IV (daerah relatif tertinggal) yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.
4. Pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY masih terpusat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Saran:

1. Pemerintah melakukan intervensi secara maksimal guna mengurangi permasalahan ketimpangan ekonomi antarwilayah di Provinsi DIY. Intervensi yang dilakukan perlu melihat kondisi dari setiap wilayah, karena kondisi setiap Kabupaten/Kota di Provinsi DIY berbeda baik dari segi geografi maupun klimatologi, sehingga untuk mengembangkan setiap wilayah memerlukan penanganan yang berbeda-beda.
2. Memacu pertumbuhan ekonomi pada wilayah di kuadran IV tipologi klassen. Dengan tumbuhnya ekonomi lebih cepat di kedua wilayah tersebut, akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakatnya sehingga dapat mengurangi angka ketimpangan antarwilayah di Provinsi DIY.
3. Memeratakan pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan pusat perekonomian baru di wilayah selatan dengan hadirnya jalur jalan lintas selatan (JJLS) Jawa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga jurnal ini dapat terselesaikan, terutama pada keluarga, Pak Bahtiar, dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan doa. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu.
- Anggraini, Yusniah. 2018. *Kebijakan Pengembangan Investasi Daerah*. Jakarta. Penerbit Indocamp.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. 2018. *Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021*. Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul. 2017. *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021*. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulonprogo. *PERDA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022*. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman. 2019. *Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman 2016-2021*. Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. 2017. *RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022*. Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY. 2018. *Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022*. Pemerintah Provinsi DIY
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY. 2018. *Penanganan ketimpangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017*. <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/infografik/ketimpangan?tahun=2017> diakses pada 8 November 2019.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY. 2019. *Penanganan Ketimpangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018*. <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/infografik/ketimpangan> diakses pada 8 November 2019.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Bab VI Perangkat Analisis untuk Perencanaan*. https://www.bappenas.go.id/files/7913/5228/2106/bab-vi-perangkat-analisis-untuk-perencanaan.pdf&ved=2ahUKEwjFxlQQtKvnAhVMWH0KHSh6B_c4FBAWMAB6BAGEEAE&usq=AOvVaw3wFVbdvgNaF9v3eowlQOsV diakses pada 30 Januari 2020.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Gini Ratio Provinsi 2002-2019*. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/04/26/1116/gini-ratio-provinsi-2002-2019.html> diakses pada 4 November 2019.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2019*. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019.html> diakses pada 13 Maret 2020.

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2019*. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2019.html> diakses pada 13 Maret 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. 2020. *Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2011-2019*. <https://bantulkab.bps.go.id/dynamictable/2020/02/28/120/laju-pertumbuhan-pdrb-seri-2010-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-tahun-2011-2019.html> diakses pada 27 Februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. 2020. *PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2011-2019*. <https://bantulkab.bps.go.id/dynamictable/2020/02/28/117/pdrb-seri-2010-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-tahun-2011-2019.html> diakses pada 28 Januari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. 2015. *Jumlah, Persentase dan Garis Kemiskinan di Kab. Gunungkidul, 2008-2014*. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/statictable/2016/01/08/8/jumlah-persentase-dan-garis-kemiskinan-di-kab-gunungkidul-2008---2014.html> diakses pada 12 Maret 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. 2020. *Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gunung Kidul Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2019 (Persen)*. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/dynamictable/2020/02/28/47/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-gunungkidul-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-tahun-2011-2019-persen-.html> diakses pada 27 Februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. 2020. *PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2019 (Juta Rupiah)*. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/dynamictable/2020/02/28/44/pdrb-kabupaten-gunungkidul-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-tahun-2010-2019-juta-rupiah-.html> diakses pada 28 Januari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. 2020. *PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2010-2019*. <https://kulonprogokab.bps.go.id/dynamictable/2018/07/10/179/pdrb-kabupaten-kulon-progo-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-2010-2019.html> diakses pada 28 Januari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. 2020. *Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2011-2019*. <https://kulonprogokab.bps.go.id/dynamictable/2018/07/10/187/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-kulon-progo-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-2011-2019.html> diakses pada 27 Februari 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2017. *Kemiskinan Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016*. <https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/06/07/77/kemiskinan-kabupaten-sleman-tahun-2010-2016.html> diakses pada 12 Maret 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2018. *Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2017 (persen)*. <https://slemankab.bps.go.id/dynamictable/2019/03/05/18/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-sleman-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-tahun-2011-2017-persen-.html> diakses pada 27 Februari 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2020. *Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015-2019*. <https://slemankab.bps.go.id/dynamictable/2020/03/02/34/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-sleman-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-persen-2015-2019.html> diakses pada 27 Februari 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2020. *Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman (juta rupiah) 2010-2019*. <https://slemankab.bps.go.id/dynamictable/2020/03/02/30/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-di-kabupaten-sleman-juta-rupiah-2010-2019.html> diakses pada 28 Januari 2020.

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. 2018. *Kemiskinan Kota Yogyakarta*. <https://jogjakota.bps.go.id/dynamictable/2017/07/10/21/kemiskinan-kota-yogyakarta.html> diakses pada 12 Maret 2020.

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. 2020. *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta (persen), 2010-2019*. <https://jogjakota.bps.go.id/dynamictable/2020/02/26/59/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-di-kota-yogyakarta-persen-2010-2019.html> diakses pada 28 Januari 2020.

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. 2020. *PDRB KOTA YOGYAKARTA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (Juta Rupiah), 2010-2017*. <https://jogjakota.bps.go.id/dynamictable/2019/02/13/39/pdrb-kota-yogyakarta-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-2010-2017.html> diakses pada 28 Januari 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. 2020. *[Seri 2010] Laju Pertumbuhan C to C PDRB Yogyakarta ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2010-2019*. <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2020/02/06/169/-seri-2010-laju-pertumbuhan-c-to-c-pdrb-d-i-yogyakarta-adhk-menurut-lapangan-usaha-persen-2010-2019.html> diakses pada 27 Februari 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. 2020. *[Seri 2010] PDRB D.I. Yogyakarta ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2010-2019*. <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2019/10/17/148/-seri-2010-pdrb-d-i-yogyakarta-adhk-2010-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-2010-2019.html> diakses pada 28 Januari 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. 2020. *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019*. <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2019/11/13/163/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015-2019.html> diakses pada 12 Maret 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. 2020. *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2011-2019*. <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2017/08/02/28/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-persen-2011-2019.html> diakses pada 12 Maret 2020.

bantulkab.go.id. *Sekilas Bantul*. <https://bantulkab.go.id/sekilas-bantul> diakses pada 13 Maret 2020

Bantul Dalam Angka 2015. Bantul: Diperbanyak oleh BPS Kabupaten Bantul

Bantul Dalam Angka 2017. Bantul: Diperbanyak oleh CV Lunar Media Sejahtera [bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id). *Profil Kabupaten Kulon Progo*. <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/834/profil-kabupaten-kulonprogo> diakses pada 13 Maret 2020.

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015. Yogyakarta: Diperbanyak oleh BPS Provinsi DIY

Darmawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung. ROSDA

Dede, Moh *et.al.* 2016. *Analisis Potensi Perekonomian Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan Serta Pertambangan dan Penggalan di Pantura Jawa Barat*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Optimalisasi Sumber Daya Alam Marta Darat dan Marta Lautan untuk Ketahanan Pangan dan Kesehatan dalam Konteks Nasionalisme, Bandung.

Departemen Statistik. *Informasi Dasar Bank Domestik Regional Bruto*. 2015. Jakarta:Bank Indonesia.

Erawati, Ni; Yasa I. 2012. Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol 1: 1-21

Fauziah, Rizkiana. 2019. *Analisis Pengaruh Kemiskinan, Diparitas Pendapatan, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Kriminalitas Properti di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017*. Skripsi diterbitkan. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB.

Gini Rasio Kota Yogyakarta 2016. Yogyakarta: Diperbanyak oleh BPS Kota Yogyakarta

Google Maps. 2020. *Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta*. <https://www.google.com/maps/place/Bantul+Regency,+Special+Region+of+Yogyakarta/@-7.8978265,110.2226686,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e7a55c76cdc539f:0x3027a76e352bc00!8m2!3d-7.9190169!4d110.3785438> diakses pada 13 Maret 2020.

Google Maps. 2020. *Gunung Kidul Regency, Special Region of Yogyakarta*. <https://www.google.com/maps/place/Gunung+Kidul+Regency,+Special+Region+of+Yogyakarta/@-7.8391183,110.3567025,10z/data=!4m5!3m4!1s0x2e7bb3a693c3d897:0x3027a76e352bc10!8m2!3d-8.0305091!4d110.6168921> diakses pada 13 Maret 2020.

Google Maps. 2020. *Kulon Progo Regency, Special Region of Yogyakarta*. <https://www.google.com/maps/place/Kulon+Progo+Regency,+Special+Region+of+Yogyakarta/@-7.8760715,110.5053024,10z/data=!4m5!3m4!1s0x2e7ae554b4872e5d:0x3027a76e352bbf0!8m2!3d-7.8266798!4d110.1640846> diakses pada 13 Maret 2020.

Google Maps. 2020. *Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta*. <https://www.google.com/maps/place/Sleman+Regency,+Special+Region+of+Yogyakarta/@-7.6896953,110.2411883,11z/data=!4m5!3m4!1s0x2e7a5ee1c5671249:0x3027a76e352bc20!8m2!3d-7.7325213!4d110.402376?hl=en> diakses pada 12 Maret 2020.

Google Maps. 2020. *Yogyakarta, Yogyakarta City, Special Region of Yogyakarta*. https://www.google.com/maps/place/Yogyakarta,+Yogyakarta+City,+Special+Region+of+Yogyakarta/data=!4m2!3m1!1s0x2e7a5787bd5b6bc5:0x21723fd4d3684f71?sa=X&hl=en&ved=2ahUKewiq7uSG_JToAhXPWisKHeXqBQ4Q8gEwDXoECAsQAQ diakses pada 12 Maret 2020.

gunungkidulkab.go.id. *Kondisi Umum*. <https://gunungkidulkab.go.id/D-74db63a914e6fb0f4445120c6fa44e6a-NR-100-0.html> diakses pada 13 Maret 2020.

Hastiyorini, Irim. 2019. *Pasar Tenaga Kerja*. Klaten. Penerbit Cempaka Putih

Hartono, Budiarto. 2008. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro

- Indonesia.go.id. *Profil Provinsi DIY*. <https://www.indonesia.go.id/province/daerah-istimewa-yogyakarta> diakses pada 11 Maret 2020.
- Irawan;Suparmoko. 2012. *Ekonomika Pembangunan Edisi Keenam*. Yogyakarta. BPFY Yogyakarta.
- Jhingan, M.L.1975. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Terjemahan oleh Guritno. 2016. Depok: Rajagrafindo Persada.
- jogjakota.go.id. *Kondisi Geografi Kota Yogyakarta*. <https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis> diakses pada 12 Maret 2020
- jogjaprov.go.id. 2019. *Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) Siap Launching*. <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/7603-bandara-new-yogyakarta-international-airport-nyia-siap-launching> diakses pada 11 Maret 2020.
- jogjaprov.go.id. 2019. *Pembangunan YIA Jadi yang Tercepat*. <https://jogjaprov.go.id/berita/detail/8061-pembangunan-yia-jadi-yang-tercepat> diakses pada 11 Maret 2020.
- Kabupaten Bantul Dalam Angka 2016*. Bantul: Diperbanyak oleh CV Lunar Media Sejahtera
- Kabupaten Bantul Dalam Angka 2018*. Bantul: Diperbanyak oleh CV Lunar Media Sejahtera.
- Kabupaten Bantul Dalam Angka 2019*. Bantul: Diperbanyak oleh CV Grape Java
- Kristiyanti, Linda. 2007. *Analisis Sektor Basis Perekonomian dan Peranannya dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Skripsi diterbitkan. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
- Noor, Juliansyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Edisi Pertama*. Jakarta. Kencana.
- Nurhasanah, Aan. 2017. *Analisis Kelayakan dan Strategi Pengembangan Wilayah dalam Wacana Pembentukan Daerah Otonom Baru Bogor Timur*. Tesis diterbitkan. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022. Provinsi DIY. Diperbanyak oleh BAPPEDA Provinsi DIY.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Bantul: Diperbanyak oleh BAPPEDA Kabupaten Bantul.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Yogyakarta: Diperbanyak oleh BAPPEDA Kota Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Sleman: Diperbanyak oleh BAPPEDA Kabupaten Sleman.
- PERDA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Kulon Progo: Diperbanyak oleh BAPPEDA Kabupaten Kulon Progo.

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Gunungkidul: Diperbanyak oleh BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul.
- Prabaningrum, Dyah. 2014. *Peranan sektor ekonomi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antarkabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (periode tahun 2005-2012)*. Skripsi diterbitkan. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2016*. Yogyakarta: Diperbanyak oleh UD Sinar Baru Offset Yogyakarta.
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2017*. Yogyakarta: Diperbanyak oleh UD Sinar Baru Offset Yogyakarta.
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2018*. Yogyakarta: Diperbanyak oleh CV Magna Raharja Tama.
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2017*. Yogyakarta: Diperbanyak oleh CV Magna Raharja Tama.
- Qurrotullain, Aini. 2013. *Penggunaan Metode Preview, Resd, Test (PQRST) Dalam Meningkatkan Kemampuan Pada Siswa Tunarungu*. Skripsi diterbitkan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rachmadi, Agung *et.al.* 2017. *Konsep pengembangan wilayah melalui analisis ekonomi wilayah (studi kasus: Kabupaten Wonosobo)*. Makalah disajikan dalam mata kuliah Ekonomi Wilayah, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS.
- Ramdhany, Muhammad. 2018. *Analisis Komoditas Unggulan Sub Sektor Pertanian Terpilih Berdasarkan Volume Produksi di Kabupaten Malang*. Skripsi diterbitkan. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB.
- Riadi, Mukti. 2008. *Analisis Sektor Ekonomi Potensial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Sari, Apriyani. 2017. *Analisis Peranan Sektor Ekonomi Basis Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015*. Skripsi diterbitkan. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang. Baduose Media.
- slemankab.go.id. *Letak dan Luas Wilayah*. <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> diakses pada 12 Maret 2020.
- Soebagiyo, Daryono *et.al.* 2015. *Analisis sektor unggulan bagi pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Tengah*. *University Research Colluquium 2015*: 138-151
- Suharto, Umayatu. 2013. *Analisis sektor unggulan dan ketimpangan ekonomi di Provinsi Banten (periode tahun 2002-2011)*. Tesis diterbitkan. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta. Kencana.
- Sun'an, Muammil. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta. Mitra Wacana Media.

- Susilo, Abdi. 2017. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Diterbitkan. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS.
- Tarigan, Robinson. 2014. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P;Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. Edisi Sebelas. Jakarta. Erlangga.
- Wirartha, I Made. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Yusuf, Maulana. 1999. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, Aplikasi Model: Wilayah Bangka-Belitung. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLVII Nomor 2*: 219-233
- Zulaechah, Retno. 2011. *Analisis pengembangan Kota Magelang sebagai pusat pertumbuhan kawasan Purwomanggung Jawa Tengah*. Skripsi Diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.